



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kepala BNPB RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 14 Januari 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 2. Membahas Isu – Isu Aktual
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 46 dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 4 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala BNPB Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

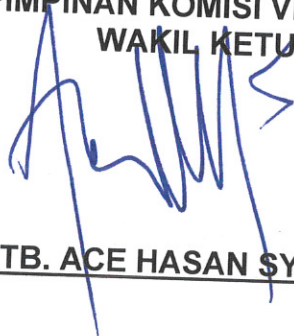
1. Komisi VIII DPR RI memberi catatan atas realisasi Anggaran BNPB Tahun 2020 sebesar Rp11.818.453.584.665,- (*Sebelas Triliun Delapan Ratus Delapan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) atau 92,97 persen dari Pagu Anggaran BNPB Tahun 2020 sebesar Rp12.712.583.693.000,- (*Dua Belas Triliun Tujuh Ratus Dua Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Komisi VIII DPR RI meminta kepada Kepala BNPB untuk menjelaskan secara rinci mengenai detail penggunaan Anggaran BNPB Tahun 2020, termasuk capaian prioritas nasional Tahun 2020 yang dilengkapi dengan besaran program dan anggaran, lokasi, dan bentuk kegiatannya. Komisi VIII DPR RI juga meminta penjelasan secara detail mengenai penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Tahun 2020. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan secara rinci mengenai penggunaan Anggaran APBN Tahun 2020 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I BNPB.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Mendukung Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 untuk terus berupaya meningkatkan dan melakukan langkah cepat dan strategis dalam menanggulangi serta mengatasi penyebaran Covid-19 yang cenderung terus meningkat.
 - b. Memperkuat koordinasi dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian pandemi Covid-19 secara tuntas dan terpadu, termasuk warga negara Indonesia di luar negeri.
 - c. Memberikan keyakinan kepada seluruh komponen masyarakat untuk mengikuti proses vaksinasi nasional dengan menjawab keraguan publik atas penggunaan vaksin tertentu.
 - d. Mendorong BNPB untuk aktif menanggulangi bencana yang diakibatkan oleh faktor hidrologi seperti banjir dan longsor, termasuk mendistribusikan bantuan untuk pengadaan air bersih, tenda, perahu karet dan peralatan lainnya.
 - e. Memberikan perhatian dan dukungan anggaran kepada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang terdampak Covid-19.

3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran BNPB Tahun 2021 sebesar Rp813.103.749.000,- (*Delapan Ratus Tiga Belas Miliar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari Program Ketahanan Bencana sebesar Rp562.712.672.000 termasuk DSP sebesar Rp250.000.000.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp250.391.077.000,-
4. Komisi VIII DPR RI dan BNPB sepakat untuk mempercepat proses pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.